

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena demokrasi selalu menjadi umpan dalam pembahasan yang hangat dikalangan ilmuwan sosial khususnya politik. Demokrasi selalu mengalami perubahan, baik dalam segi bentuk maupun substansi sesuai konteks dan dinamika dimana konsep demokrasi lahir dan berkembang.¹ Begitupun Indonesia menjadi salah satu negara penganut sistem demokrasi. Yang turut memberikan kesempatan setara kepada seluruh masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta seluas-luasnya dalam memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender.² Artinya suatu pemerintahan akan dikatakan demokratis apabila di dalam mekanisme pemerintahan tersebut mengedepankan kehendak rakyat. Dan salah satu wujud konkret dari hal tersebut yaitu dengan pelaksanaan demokrasi elektoral yang berkualitas.

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) memberikan ruang pada individu sebagai aktor politik yang bebas dan mandiri dalam mengekspresikan kepentingan di ruang publik dan ruang partisipasi politik masyarakat. Hal ini menjadi titik berangkat

¹ Muhammad Zulfan Hakim. 2010. "Demokrasi dalam Pilkada di Indonesia". *Laporan penelitian*. Hukum tata Negara.Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin. Hal. 2

² Pambumdi, M. Y. 2007. "Perempuan Dan Politik Studi Tentang aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Airlangga. Hal. 1

revolusi perilaku memilih dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia.³ Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi saat pemilu menjadi kunci dalam perkembangan demokrasi elektoral kedepannya. Hubungan ini akan terus berpengaruh dengan setiap masyarakat yang memiliki perilaku dan kepentingan individu saat menentukan pilihan dalam pemilu.

Perilaku memilih menurut Ramlan Surbakti adalah aktifitas pemberian suara oleh seseorang yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih (*to vote*), dengan dia akan memilih calon atau partai politik di suatu pemilu. Dan jika ia memutuskan untuk tidak akan memilih (*not to vote*), maka dia tidak ikut dalam memberikan suara di pemilu. Perilaku memilih dalam suatu pemilu ditunjukkan dengan memilih calon atau partai politik tertentu.⁴ Perilaku memilih dapat dilihat dari tiga pendekatan, yakni: 1) Pendekatan Sosiologis, yang didasarkan pada karakteristik sosial dan pengelompokkan pada sosial; 2) Pendekatan Psikologis, berkaitan dengan fenomena pikiran manusia dalam tingkah laku dan aktifitas masyarakat yang mempengaruhi akal individu yang berkaitan dengan ilmu politik; dan 3) Pendekatan Rasional, yakni kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang dipertimbangkan seseorang dalam pemilu. Ini menandakan bahwa pemilih yang rasional akan memilih partai yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Di dalam pendekatan psikologis dijelaskan bahwa sikap menjadi sesuatu yang mempengaruhi si pemilih. Misalnya sistem kepercayaan,

³ Arifin, W. 2017. *Perilaku Memilih dalam Pemilu*. Indie Book Corner. Yogyakarta. Hal. 56

⁴ Ramlan Surbakti. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 169

agama, dan pengalaman hidup seseorang. Pendekatan ini dipercaya bahwa tingkah laku individu akan membentuk suatu norma kepercayaan pada individu tersebut.

Dalam politik suatu kepercayaan menurut Ramlan Surbakti adalah sikap atau perilaku dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemerintahnya, apakah ia menilai pemerintah layak untuk dipercaya dan dapat dipengaruhi atau sebaliknya.⁵ Kepercayaan atau ketidakpercayaan publik sering digunakan untuk menjelaskan fenomena yang berbeda-beda, memiliki cakupan yang luas, dan merujuk pada berbagai bentuk ketidakpuasan atau kekecewaan publik terhadap pemerintah yang dinilai gagal dalam memenuhi harapan-harapan publik. Teori kepercayaan politik digunakan untuk menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara demokrasi. Dan digunakan sebagai langkah untuk melihat sejauh mana tingkat kepercayaan politik pada sebuah pilar demokrasi yang ada dinegara demokrasi.⁶ Kepercayaan politik merupakan modal berharga bagi pemegang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dengannya keterikatan antara kepercayaan politik oleh masyarakat dalam perilaku yang dihadirkan saat memilih menjadi rangkaian yang sangat menarik untuk dibahas terutama jika dikaitkan dengan memilih pada gender perempuan.

Eksistensi pemilih perempuan sebagai pemilih terbanyak yakni di atas 50 persen membuat harapan terkait partisipasi yang berkualitas dengan peran

⁵ *Ibid.* Hal. 184

⁶ Feryda Rinjani, Effendi Hasan. 2016. "Kepercayaan Politik Pada Pilar Demokrasi (Suatu Analisis terhadap Independensi JSI Kota Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Survey Pra Pilkada 2017)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol 1, No. 4 1-17. Hal. 7

membawa keterwakilan perempuan pada perpolitikan di Indonesia membaik. Namun alih-alih perempuan mendominasi politik di tanah air, justru hasil rekapitulasi pemilu 2019 secara nasional untuk keterwakilan masih belum mencapai 30 persen.⁷ Idealnya perilaku memilih yang ada pada pemilih perempuan merupakan kesadaran dari perempuan itu sendiri untuk mengakomodasi kepentingan khususnya yang mungkin saja tidak bisa terwakili dari kaum politik laki-laki.⁸ Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan pola perilaku dalam memilih antara perempuan dan laki-laki dimana kecenderungan yang ada pada perempuan lebih konservatif dalam menentukan pilihan dibanding laki-laki. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Inglehart & Norris pada tahun 2000,⁹ dengan ditemukan adanya kesenjangan yang jauh antara tahun 1964 sampai tahun 1992, yaitu perempuan lebih memilih partai Demokrat 10 persen lebih banyak dibanding dengan laki-laki.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmaturrizqi, dkk, dengan judul Gender dan Perilaku Memilih: Sebuah Kajian Psikologi Politik bahwa terdapat perbedaan bentuk dari pertimbangan dalam memilih antara laki-laki dan perempuan dikarenakan perempuan memiliki pandangan yang berbeda pada isu-isu tertentu, seperti misalnya kemiskinan,

⁷ Jaa Pradana. "Sebagai Pemilih Terbanyak, Dewi Harap Keterwakilan Politik Perempuan Meningkat" <https://bawaslu.go.id/en/berita/sebagai-pemilih-terbanyak-dewi-harap-keterwakilan-politik-perempuan-meningkat> diakses pada 21 September 2023 Pukul 19.40 WIB

⁸ Lestari, L., & IP, S. 2017. "Perilaku Politik Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1. Hal. 3

⁹ Rahmaturrizqi, R., Nisa, C., & Nuqul, F. L. 2012. "Gender dan Perilaku Memilih: Sebuah Kajian Psikologi Politik". *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 3(1), 49-57. Hal. 3-4

kesetaraan gender, aborsi, dan hukuman mati.¹⁰ Artinya fenomena yang menyangkut pemilih perempuan terhadap pengaruh keterwakilan perempuan diidentifikasi memiliki faktor belakang dari kepercayaan politik perempuan itu sendiri.

Berikut penelitian terdahulu yang juga membahas kepercayaan politik yang dilakukan oleh Randy Pranata Putra tentang Pengaruh *Political Trust*, Efikasi Politik dan Orientasi kandidat Terhadap Partisipasi Politik, Masyarakat Multi Etnis Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019. Pada penelitian ini membahas terkait bagaimana *political trust*, efikasi politik dan orientasi kandidat dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, dengan hasil temuan bahwa adanya pengaruh secara signifikan pada *political trust*, efikasi politik dan orientasi kandidat terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif tahun 2019. Dan penemuan lain pada penelitian terkait perilaku memilih masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang sudah merubah orientasi kandidat dengan pertimbangan pendekatan psikologis bukan lagi pada pendekatan sosiologis.¹¹ Penelitian ini memiliki perbedaan pada variabel efikasi politik dan orientasi kandidat terhadap partisipasi politik dan memiliki kesamaan dalam melihat kepercayaan politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, peneliti lebih fokus untuk melihat bagaimana kepercayaan politik kepada calon legislatif

¹⁰ *Ibid.* Hal. 4

¹¹ Randy, P. P. 2021. "Pengaruh *Political Trust*, Efikasi Politik Dan Orientasi Kandidat Terhadap Partisipasi Politik, Masyarakat Multi Etnis Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019". *Doctoral dissertation*, Universitas Andalas

perempuan terhadap perilaku memilih perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Padang.

Berdasarkan data Daftar Calon Tetap (DCT) Tahun 2019 dari KPU Kota Padang, dengan total jumlah 716 calon tetap, ada sebanyak 246 calon legislatif perempuan (lihat pada lampiran 1) dan 470 calon legislatif laki-laki yang mendaftar untuk perebutan 45 kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Artinya, kesadaran perempuan pada keikutsertaan berpolitik sudah mengarah pada keterwakilan yang cukup. Berdasarkan data pemilu legislatif tahun 2019 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang bahwasanya hanya enam orang anggota legislatif keterwakilan perempuan yang berhasil duduk di kursi DPRD Kota Padang memperlihatkan kesuksesan dalam pelaksanaan capaian 30 persen keterwakilan perempuan masih butuh aspek lainnya untuk terwujud. Salah satu aspek tersebut didapatkan dari dukungan kalangan sesama perempuan sebagai posisi pemilih. Maka dari itu, peneliti ingin mencoba melihat hubungan kepercayaan politik kepada calon legislatif perempuan terhadap perilaku memilih perempuan di Kota Padang Tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Realitas yang terjadi di Sumatera Barat pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 pada tingkat kepercayaan politik berdasarkan penelitian dalam analisis terhadap indeks demokrasi Sumatera Barat oleh Fajri H, dkk dapat dilihat bahwa adanya kenaikan dari tahun sebelumnya dalam hasil indeks demokrasi di Provinsi Sumatera

Barat.¹²

Tabel 1.1
Indeks Kepercayaan Politik Sumbar Tahun 2018 dan 2019

	Tahun 2018	Tahun 2019	Ket
Demokrasi	67,06%	67,69%	Naik
Peran DPRD	68,05%	79,04%	Naik

Sumber: Diolah dari Data Indeks Demokrasi Indonesia

Dilihat dari tabel 1.1, persentase kepercayaan pada demokrasi di Sumatera Barat naik 0,63 persen dari tahun sebelumnya. Artinya, masyarakat memiliki kepercayaan politik yang meningkat ke arah positif sebab dengan adanya demokrasi, masyarakat percaya dapat melahirkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Lalu kepercayaan terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejalan menuju peningkatan dari masyarakat Sumatera Barat. Maka bisa dikatakan peranan yang dilakukan oleh DPRD cukup baik dalam fungsinya. Akan tetapi jika ditelaah lebih lanjut, ini berbanding terbalik dengan kepercayaan politik terhadap calon legislatif perempuan, bisa dilihat dari masih rendahnya keterwakilan perempuan di tingkat legislatif khususnya di DPRD Kota Padang.

Pada pemilu serentak 2019 keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang tidak sesuai dengan harapan. Sedangkan Kota Padang sebagai kota yang memiliki pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki seharusnya menghasilkan

¹² Fajri, H., Wahyuni, N., Saputra, B., & Maani, K. D. 2021. Demokrasi Pincang: Analisis Terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Pasca Reformasi. *Jurnal El-RIYASAH*, 12(1), 108-128. Hal. 10

keterwakilan perempuan yang diharapkan. Pada pemilu legislatif tahun 2019 di kota Padang, calon legislatif yang mendaftar total jumlah 716 calon tetap, ada sebanyak 246 calon legislatif perempuan (lihat pada lampiran 1) dan 470 calon legislatif laki-laki yang mendaftar untuk perebutan 45 kursi pada DPRD Kota Padang. Dan menghasilkan enam orang anggota legislatif keterwakilan perempuan yang duduk di kursi DPRD Kota Padang.

Tabel 1. 2
Daftar Nama Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Padang 2009, 2014 dan 2019

Tahun 2009	Tahun 2014	Tahun 2019
Gustin Pramona	Gustin Pramona	Yuhilda Darwis
Paula Iindawati	Mailinda Rose	Salisma
Rahayu Purwanti	Dian Anggraini	Elly Thrisyanti
	Octavia	Dewi Susanti
	Dewi Susanti	Nila Kartika
	Elly Thriyanti	Irawati Meuraksa
	Yuhilda Darwis	
	Nila Kartika	

Sumber: Diolah dari data KPU daftar anggota DPRD kota Padang 2020

Berdasarkan tabel 1.2, dilihat dari pelaksanaan pemilu legislatif selama tiga periode, jumlah keterwakilan perempuan masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah sejalan dalam kebijakan *Affirmative Action* sebanyak 30 persen. Pada tahun 2009 hanya tiga kandidat yang lolos dan pada tahun 2014 naik menjadi tujuh kandidat lalu turun kembali di tahun 2019 dengan hanya meloloskan enam orang perempuan dan adanya empat petahana yang duduk kembali di DPRD Kota Padang.¹³ Jika kita lihat data mengenai pemilih

¹³ Antanews.com. "Luar Biasa, 246 caleg perempuan incar kursi DPRD Padang di Pileg 2019". <https://sumbar.antaranews.com/berita/231136/luar-biasa-246-caleg-perempuan-incar-kursi-dprd->

perempuan dan pemilih laki-laki yang dirilis oleh KPU Kota Padang.

Tabel 1. 3
Data Partisipasi Pemilih DPRD Padang 2009, 2014 dan 2019

Tahun	Perempuan	Laki-Laki
2009	278.359	269.655
2014	196.143	157.031
2019	253.301	216.814

Sumber: diolah dari data KPU data partisipasi pemilih DPRD kota Padang 2019

Dilihat dari tabel 1.3, dengan jumlah pemilih perempuan sebanyak 253.301 dan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 216.814, seharusnya dengan jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih laki-laki pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Padang dapat menjadi peluang besar bagi calon legislatif dari kalangan perempuan untuk mengisi kursi DPRD Kota Padang. Artinya, meskipun calon legislatif perempuan yang mendaftar dan memperebutkan kursi pada pemilu legislatif 2019 di Kota Padang cukup banyak tetapi hanya sedikit perempuan yang berhasil menduduki kursi tersebut.

Dengan dugaan terkait kepercayaan yang dimiliki oleh pemilih perempuan kepada calon anggota legislatif perempuan DPRD Kota Padang maka peneliti melakukan wawancara singkat kepada dua pemilih perempuan Kota Padang yang ikut berpartisipasi pada Pemilu Tahun 2019. Dengan informan pertama, Erlina menjelaskan bahwasanya kemampuan dari calon legislatif perempuan dalam memimpin sendiri masih diragukan, dengan kutipan sebagai berikut:

Saya memiliki keraguan dalam memilih orang legislatif dari kalangan

perempuan sebab untuk kemampuan memimpin saya rasa lebih bagusnya laki-laki karena di agama sendiri memberitahukan hal itu.¹⁴

Selaras dengan kalimat yang disampaikan oleh informan pertama, Zora sebagai pemilih perempuan juga menjelaskan terkait janji-janji kampanye calon legislatif perempuan yang dirasa belum terealisasi, dengan kutipan sebagai berikut:

Saya sudah kecewa saja melihat sikap mereka yang hanya banyak janji saat kampanye, karena saya pernah dijanjikan oleh calon legislatif perempuan yang ternyata ketika sudah naik, janji tersebut hanya sekedar omongan belaka. Jadi melihat calon-calon anggota legislatif dari perempuan bawaannya saya tidak percaya saja.¹⁵

Dan pernyataan tersebut memiliki pandangan yang cukup berbeda dari seorang calon legislatif perempuan berasal dari partai Gerindra, Edriana, S.H, M.H terkait kemampuan caleg perempuan dengan pengaruh perilaku memilih seorang pemilih perempuan, dengan kutipan sebagai berikut:

Sebenarnya kekuatan dari perempuan sendiri adalah perhatian (*concern*) dimana hal ini menjadi perbedaan utama dalam kemampuan terhadap caleg laki-laki. Dan saya merasa dari segi kualitas pun dari caleg laki-laki banyak juga yang tidak berkualitas jika hal kualitas menjadi komparasi dengan caleg perempuan itu sendiri. Jadi terkait krisis pemilih perempuan belum memilih caleg perempuan rasa saya memang karena persoalan isi tas. Seperti masih banyak dari caleg perempuan yang belum turun ke lapangan, bertemu langsung dan memberikan manfaatnya saat kampanye kepada masyarakat. Sehingga saat pemilihan, caleg perempuan dikenal dan turut dipilih.¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Informan Erlina. Pada tanggal 26 September 2023 Pukul 14.30 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Informan Zora. Pada tanggal 26 September 2023 Pukul 15.50 WIB

¹⁶ Webinar series IX Departemen Ilmu Politik. Pada Tanggal 10 Februari 2024 Pukul 11.10 WIB

Jadi dengan paparan pernyataan dan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti berasumsi bahwasanya kegagalan calon legislatif perempuan dalam pemilu legislatif disebabkan oleh tingkat kepercayaan pemilih perempuan terhadap calon legislatif perempuan itu rendah. Oleh karena itu, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Hubungan Tingkat Kepercayaan Politik kepada Calon Legislatif Perempuan Terhadap Perilaku Memilih Perempuan pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Padang ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat kepercayaan politik kepada calon legislatif perempuan terhadap perilaku memilih perempuan pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu khususnya Ilmu Politik yang berkaitan dengan kepercayaan politik kepada calon legislatif perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan mengenai kepercayaan politik terhadap perilaku memilih, serta penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai perilaku memilih, terkhususnya

bagi mahasiswa jurusan ilmu politik. Selanjutnya dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan dan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pembangunan ilmu pengetahuan, yang menyangkut masalah kepercayaan politik dan perilaku memilih.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam menyikapi kepercayaan politik kepada calon legislatif perempuan terhadap perilaku memilih perempuan Kota Padang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terkait kepercayaan politik dan perilaku memilih khususnya dalam memilih calon legislatif perempuan.

